

MULTIKULTURALISME DAN HEGEMONI POLITIK PERNIKAHAN ENDOGAMI: Implikasi dalam Dakwah Islam

Syarifah Ema Rahmaniah

Universitas Tanjungpura Pontianak
e-mail: ema_rahmaniah@yahoo.com

Abstract

This paper described a variety of views on the dynamics of endogamy marriage practiced by *sharif* community in Pontianak. This paper used the theory of hegemony to analyze Surah al-Ahzab: 33 as the cause of endogamy among the descendants of 'Isa al-Muhajir (*Ba 'Alawi*) that have migrated to the archipelago. One of her off spring grew and spread in Pontianak was called *sharif* or *syarifah* of Pontianak. The results of this study explained that there are three different attitudes about endogamous marriage, they are accept, reject and moderate thinking. The three different attitudes came out as the result of modernization, contact with foreign cultures, the influence of education, socio-economic, and the existing settlement pattern. There is a socio-political implications of the verses of hegemony that is keeping the values of the potential political kinship as social capital to raise awareness and political culture in the context of community participation and representation of sharif in local and national politics. But in sociocultural context. Once endogamy was understood as an absolute system that must be run so it may open space of social stratification that threatens women's freedom and will open the spaces for subordination.

Tulisan ini mendeskripsikan berbagai pandangan mengenai dinamika pernikahan endogami yang dipraktikkan oleh komunitas syarif Pontianak. Tulisan ini menggunakan teori hegemoni menganalisis surat al-Ahzab ayat 33 sebagai penyebab terjadinya endogami di kalangan keturunan Isa al-Muhajir (*Ba 'Alawi*) yang bermigrasi ke Nusantara. Salah satu keturunannya yang berkembang di kota Pontianak disebut sebagai syarif/syarifah Pontianak. Hasil penelitian menjelaskan terdapat tiga sikap yang berbeda mengenai pernikahan endogami yaitu kalangan yang menerima, menolak dan yang berpikir moderat. Tiga sikap yang berbeda ini terjadi akibat adanya modernisasi, kontak dengan budaya luar, pengaruh pendidikan, sosial ekonomi, dan pola pemukiman yang ada. Terdapat implikasi sosio politik ayat-ayat hegemoni yaitu menjaga nilai-nilai kekerabatan yang secara politik berpotensi sebagai modal sosial untuk meningkatkan kesadaran dan budaya politik dalam konteks partisipasi dan keterwakilan komunitas syarif dalam politik lokal dan nasional. Namun secara sosio-budaya jika endogami dipahami sebagai suatu sistem absolut yang mesti dijalankan dapat membuka ruang terjadinya stratifikasi sosial yang mengancam kebebasan perempuan dan membuka ruang terjadinya subordinasi.

Keywords: syarif, Pontianak, endogami, hegemoni, stratifikasi sosial

A. Pendahuluan

Komunitas *Ba 'Alawi*¹ merupakan komunitas keturunan Nabi Muhammad SAW melalui garis keturunan Fatimah dan melakukan migrasi dari Hadramaut, Yaman Selatan ke Indonesia untuk berdagang sembari menyebarkan agama Islam pada abad ke-17.² Mereka tergolong sebagai etnik diaspora. Istilah diaspora berasal dari bahasa Yunani Kuno untuk merujuk kepada bangsa atau penduduk etnis manapun yang terpaksa atau terdorong untuk meninggalkan tanah air etnis tradisional mereka. Kedatangan mereka ini selain untuk berdagang dan menyebarkan agama, mereka juga melakukan pembauran dengan pribumi melalui pernikahan bahkan sebelum Belanda datang ke Indonesia.³ Namun pernikahan tersebut cenderung lebih banyak dipraktikkan oleh laki-laki Arab dengan perempuan pribumi. Di antara mereka ada yang masih menganggap dirinya sebagai etnik Arab.⁴ Menurut Amal, hal ini terjadi karena adanya perbedaan pengetahuan dan kesadaran bahwa mereka berbeda dari kelompok etnik lainnya. Perbedaan ini atas dasar beberapa hal. Pertama, mereka memiliki nenek moyang yang sama yaitu dari Hadramaut bernama Ahmad bin Isa atau yang disebut Almuhajir. Kedua, karena mereka adalah satu kelompok yang memiliki ciri-ciri primordial yang sama. Kedua hal tersebut diperlihatkan dalam interaksi internal mereka seperti acara keluarga besar berupa pernikahan, pengajian keluarga, Haul, dan acara-acara keluarga lainnya. Namun dalam ranah publik, mereka tetap sebagai orang Indonesia berinteraksi dengan etnik yang lain bahkan berbicara dalam bahasa Indonesia maupun bahasa lokal lainnya. Interaksi sosial inilah yang menyebabkan timbulnya *in group* dan *out group feeling*.

Di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak, komunitas *Ba 'Alawi* ini sudah melakukan asimilasi dengan orang-orang dari etnik Dayak, Bugis dan Tionghoa bahkan pada masa Kolonial Belanda istri Sultan Hamid II adalah seorang perempuan Belanda.⁵ Mereka tidak lagi menggunakan identitas Arabnya namun

¹Diambil dari nama Alwi anak laki-laki Ahmad bin Isa Almuhajir

²Yasmine Zaky Shahab, "Sistem Kekebabatan Sebagai katalisator Peran Ulama Keturunan Arab di Jakarta," *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol. 29 No 2 tahun 2005, h. 5.

³Van den L.W.C Berg, *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara*, (Jakarta: INIS, 1989), h. 67.

⁴Siti Hidayati Amal, "Menelusuri Jejak Kehidupan Keturunan Arab Jawa di Luar Tembok Keraton Yogyakarta" *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol 29 No 2, 2005, h. 159-160.

⁵Keturunan *Ba 'Alawi* yang pertama kali masuk ke kota Pontianak adalah Syarif Abdurahman anak dari Syarif Husein yang kemudian mendirikan Kesultanan Pontianak. Sejarah berdirinya kota Pontianak yang ditulis oleh sejarawan Belanda Verth, V.J. dalam bukunya *Borneos Wester Afdeling* yang memiliki perbedaan versi cerita masyarakat selama ini. Menurut Verth, Syarif Abdurahman putra dari ulama Syarif Husein bin Ahmad Al-qodrie meninggalkan kerajaan Mempawah dan merantau ke Banjarmasin menikah dengan adik Sultan di Banjar yang bernama Sarib Anom, Setelah berhasil dalam

menggunakan nama khas Melayu, berpakaian Melayu, bertata krama Melayu, melakukan adat istiadat khas Melayu Kalimantan Barat⁶ Meskipun mereka memiliki satu moyang yang sama yaitu keturunan dari Ahmad bin Isa, namun mereka memiliki tingkat kesadaran dan pengetahuan yang rendah tentang hal tersebut⁷

Di Kota Pontianak, salah satu fenomena yang menarik adalah pernikahan endogami syarif Pontianak⁸ yang dikaji oleh Siregar dalam disertasi doktornya (2009) yang berjudul *'Pernikahan Endogami Pada Komunitas Arab Alawiyyun di Kota Pontianak'*. Kajian dari disertasi ini menjelaskan pernikahan endogami di Pontianak selain didasarkan pertimbangan untuk mempertahankan nasab keturunan juga disisipi motif ekonomi dan politis.⁹ Penerapan sistem pernikahan endogami ini diberlakukan secara ketat di kalangan Arab Alawiyyun di Kota Pontianak. Menurut Siregar, perlu kajian ulang secara kritis dan mendalam terhadap tatanan hukum Islam dan tatanan budaya yang menyangkut sistem pernikahan endogami. Oleh karena itu penulis mencoba memaparkan dinamika pernikahan endogami komunitas syarif Pontianak dalam perspektif sosiopolitik dengan menggunakan teori hegemoni sebagai landasan teori penyebab terjadinya endogami dan implikasinya terhadap kehidupan sosiopolitik syarif Pontianak.

Salah satu bentuk pernikahan yang masih berlaku pada sebagian masyarakat adalah bentuk pernikahan endogami. Bentuk pernikahan endogami masih dipertahankan sampai saat ini di kalangan masyarakat keturunan Arab, khususnya keturunan Arab yang berada di kampung Arab dan Kampung Dalam Bugis Pontianak Timur. Pernikahan endogami pada masyarakat keturunan Arab

perdagangan dan memiliki cukup modal untuk mempersenjatai kapal pencalang dan perahu lancangnya, ia kemudian melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Dengan bantuan Sultan Passir, Syarif Abdurahman kemudian berhasil membajak kapal Belanda di Bangka dan kapal Inggris dan Perancis di pelabuhan Passir. Kemudian Syarif Abdurahman setelah menjadi seorang yang kaya mendirikan pemukiman di sebuah pulau di sungai Kapuas, ia menemukan percabangan sungai Landak dan mengembangkan daerah yang menjadi pusat perdagangan yang makmur yang dikenal sebagai Kota Pontianak yang didirikan pada tanggal 23 Oktober 1771.

⁶Ada beberapa tafsiran mengenai Identitas Melayu di Kalimantan Barat sebagai proses domestikasi dan asimilasi yang berhasil karena kesamaan agama Islam dan peranan keturunan Arab di Pontianak sebagai tokoh Agama yang dihormati. Namun ini tidak menjadi fokus utama tulisan ini.

⁷Hal ini juga dipertegas oleh Berg, Van den, L.W.C, *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara*, (Jakarta: INIS, 1989), h. 129. Kajiannya di Jawa, mengatakan ada sebuah keluarga Arab yang berasal dari Hadramaut menduduki posisi penting di kesultanan Yogyakarta. Keluarga ini telah kehilangan ciri Arabnya dan menjadi orang Jawa namun van den Berg tidak memberikan penjelasan mengenai keluarga Jawa tersebut.

⁸Syarif: gelar bagi laki-laki keturunan ba alwi di Pontianak, syarifah untuk perempuan

⁹Hamka Siregar, "Pernikahan Endogami Pada Komunitas Arab Alawiyyun kota Pontianak," *Disertasi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), h. 20.

memiliki prinsip bahwa pernikahan yang dilakukan oleh mempelai harus berasal dari lingkungan kerabat terdekat dan larangan untuk melakukan pernikahan dengan pihak dari luar klan (keturunan/suku) yang bukan keturunan Arab. Istilah endogami sebenarnya memiliki arti yang relatif, sehingga kita selalu perlu menjelaskan apa batas-batasnya.

Penentuan batas-batas tersebut tergantung pada budaya yang dipegang oleh setiap masyarakat yang tentunya akan berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.¹⁰ Batasan itu dapat berupa endogami agama, endogami desa, endogami suku/keturunan, endogami ekonomi ataupun endogami kasta. Misalnya endogami agama yang merupakan larangan untuk melakukan pernikahan dengan seseorang yang memiliki agama yang berbeda dari agama yang kita anut.

Masyarakat keturunan Arab Kelurahan Dalam Bugis melakukan endogami dengan batasan endogami agama dan endogami suku/keturunan. Penerapan larangan pernikahan tersebut karena adanya anggapan jika pernikahan dilakukan dengan seseorang yang tidak berasal dari keturunan Arab, maka rahasia atau aib keluarga akan diketahui oleh orang luar yang tidak ada hubungan kerabat (bukan keturunan Arab). Kampung Arab di Kelurahan Dalam Bugis, Pontianak penting untuk dilihat karena beberapa hal. Pertama, dalam hal tempat tinggal kampung ini hidupnya telah berbaur dengan masyarakat pribumi lain (bukan keturunan Arab) yang dalam artian bahwa yang tinggal di Kampung Dalam Bugis masih banyak yang berasal dari keturunan Arab.¹¹

Untuk itulah demi mengisi kekosongan dari kajian-kajian yang relevan, dilakukan kajian atas komunitas Ba 'Alawi. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Artikel ini disusun dengan dua pembahasan

¹⁰Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta 2002), h. 80.

¹¹Ada beberapa kajian yang menjelaskan praktek pernikahan endogami di Indonesia, seperti kajian Ni Kadek Yunita Parwesi, Parwesi, "Perkawinan Endogami Di Kalangan Masyarakat Tenganan Pegriingsingan Di Kabupaten Karangasem Bali," *Tesis*, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Gajahmada, 2012). Penelitian tersebut memaparkan pernikahan endogami di kalangan masyarakat Tenganan Pegriingsingan khususnya mengenai faktor pendorong terjadinya pernikahan endogami dan sanksi terhadap pelanggaran pernikahan endogami di masyarakat Tenganan Pegriingsingan Bali. Faktor-faktor pendorong masih dilakukannya pernikahan endogami adalah adanya tradisi leluhur, pernikahan ideal, larangan pernikahan dan hak waris. Kurnia Rizkiati, "Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Keturunan Arab (Studi di kampung Arab Al Munawar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang), *Skripsi* tidak diterbitkan, (Palembang: Universitas Sriwijaya Palembang, 2012), dan kajian Hamka Siregar tentang pernikahan endogami oleh Syarifah Pontianak dalam perspektif Fiqh Syariah.

utama, yaitu sikap syarifah Pontianak mengenai pernikahan endogami serta potensi politik dan kemungkinan ancaman sosial yang terjadi terutama bagi individu perempuan atau syarifah tersebut, serta implikasinya dalam penyebaran nilai-nilai Islam.

B. Pernikahan Endogami

Pernikahan endogami adalah suatu bentuk pernikahan yang berlaku dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat kawin atau menikah dengan anggota lain dari golongan sendiri. Tegasnya, pernikahan endogami ini adalah pernikahan antar kerabat atau pernikahan yang dilakukan antar sepupu (yang masih memiliki satu keturunan) baik dari pihak ayah sesaudara (patrilineal) atau dari ibu sesaudara (matrilineal). Kaum kerabat boleh menikah dengan saudara sepupunya karena mereka yang terdekat dengan garis utama keturunan dipandang sebagai pengemban tradisi kaum kerabat, perhatian yang besar dicurahkan terhadap silsilah atau genealogi.¹² Dalam buku lain, disebutkan bahwa, pernikahan endogami adalah suatu sistem pernikahan yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang se-klan (satu suku atau keturunan) dengannya atau melarang seseorang melangsungkan pernikahan dengan orang yang berasal dari klan atau suku lain.¹³

Dalam al Qur'an, tidak didapatkan ayat yang mengharamkan pernikahan endogami. Dengan kata lain, endogami diperbolehkan dengan syarat batasan-batasan pertalian keluarga tidak terlalu dekat. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 23-24 mengenai wanita yang haram untuk nikahi. Komunitas Arab merupakan warga atau orang-orang keturunan dari Negara Arab yang hidup sebagai pendatang di Indonesia dan hidup berinteraksi dalam lingkungannya serta terkait oleh suatu rasa identitas bersama. Hubungan masyarakat keturunan Arab dengan masyarakat Indonesia terjalin dengan baik, hal ini dikarenakan mayoritas agama yang dianut masyarakat Indonesia adalah Islam. Sehingga, walaupun berbeda dalam suku bangsa tetapi memiliki rasa solidaritas yang kuat dari segi keagamaan. Tetapi tidak dalam hal pernikahan, masyarakat keturunan Arab tidak 'berbaur' dengan masyarakat pribumi Indonesia, karena adanya adat istiadat yang harus dipatuhi serta dijalankan yaitu melakukan per-

¹²Goode J, William, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 134.

¹³Ridwan Halim, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1987), h. 43.

nikahan dengan satu klan atau keturunannya. Dari uraian diatas, masalah penelitian ini berkaitan dengan teori aksi (tindakan) dari Talcott Parsons.¹⁴

Menurut Parson tindakan itu sendiri berarti melakukan sesuatu baik melakukan sesuatu karena atau melakukan sesuatu untuk. Seperti halnya pernikahan, pernikahan merupakan suatu tindakan rasional yang ingin dilakukan ataupun tidak ingin dilakukan. Tindakan juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan karena mendapat pengaruh orang lain atau juga bisa karena diri sendiri yang termotivasi sesuatu. Sama halnya dengan pernikahan endogami yang terjadi pada masyarakat keturunan arab yang bisa dilakukan karena keinginan sendiri atau karena mendapat pengaruh dari keluarga ataupun lingkungan sekitarnya. Dari uraian di atas, Parsons menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut:¹⁵

1. Adanya individu sebagai aktor
2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu.
3. Aktor mempunyai alternatif cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuannya.
4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi, sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu misalnya kelamin dan tradisi.
5. Aktor berada di bawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan, misalnya kendala kebudayaan.

Menurut teori Parsons tersebut, pernikahan endogami berkaitan dengan masyarakat keturunan Arab (sebagai aktor) yang telah memiliki kebudayaan tertentu, serta di dalam keluarga menganut sistem kekerabatan dari garis keturunan laki-laki (kondisi sosial), yang ditandai oleh masih mencari jodoh di

¹⁴Pemikiran Parsons ini dipengaruhi oleh MaxWeber yang juga menjelaskan tentang teori tindakan. Talcott Parsons menjelaskan bahwa teori aksi sangat memperhatikan sifat kemanusiaan manusia dan subyektivitas tindakan manusia, George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 48. Dalam teori Parsons, tidak semata-mata mengutamakan tindakan individual, tetapi juga merupakan tindakan atas kondisi-kondisi objektif yang disatukan dengan komitmen kolektif terhadap suatu nilai untuk perkembangan suatu bentuk tindakan sosial tertentu, Ambo Upe, *Tradisi Aliran dalam Sosiologi: Dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) h. 115-116.

¹⁵George Ritzer, *Sosiologi Ilmu*, h. 48.

lingkungan kerabat sendiri dan dalam pengambilan keputusan hanya berada pada orang tua atau ayah sebagai pihak laki-laki saja.

Para aktor ini terutama wanita, berupaya mengubah keadaan dengan cara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (adanya tujuan), supaya bebas dalam hal mencari jodoh yang sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi, hal ini terkendala oleh adat istiadat yang mengharuskan aktor tetap menikah dengan satu keturunan atau satu suku/klan saja agar tali persaudaraan tidak terputus (adanya nilai dan norma). Dalam menghadapi situasi dan kondisi yang bersifat kendala tersebut, aktor mempunyai sesuatu didalam dirinya untuk mencapai tujuannya sendiri. Aktor dapat mencari alternatif lain dengan tidak mengikuti adat istiadat tersebut. Artinya, aktor masih memiliki peluang untuk tidak melakukan pernikahan endogami, tetapi hal ini sulit dilakukan oleh sang aktor dikarenakan terdapat sanksi dari masyarakat jika aktor tidak menjalankan tradisi yang telah dipertahankan sejak lama oleh masyarakat kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis. Sanksi tersebut dapat berupa pengucilan, pengasingan, maupun dihapuskan dari garis keturunan keluarga.

C. Antara Potensi Politik dan Sub-Ordinasi

Pernikahan endogami dilakukan berdasarkan kesamaan group, baik itu etnik, suku, agama maupun status sosial ekonomi. Tidak dapat dinafikan bahwa manusia cenderung lebih tertarik dan merasa aman dan nyaman, jika memilih atau mendapat pasangan hidup karena kesamaan *group*.¹⁶ Pernikahan endogami ini dari sudut pandang sosiologi adalah manusiawi sifatnya asalkan tidak menimbulkan masalah sosial lainnya seperti tingginya perasaan etnisitas, etnosentris dan memicu dalamnya stratifikasi sosial. Intinya, endogami merupakan bagian dari suatu adat maupun tradisi yang telah disepakati bersama ketika suatu kelompok masyarakat hidup dalam suatu komunitas tertentu yang terikat dengan aturan ataupun norma tradisi atau adat yang ada.

¹⁶Bentuk pernikahan ini menurut Newman dan Grauerholz terjadi dalam rangka untuk menjaga kekuasaan dan kekayaan tetap utuh. Oleh sebab itu dianjurkan untuk kawin dengan orang yang ada berhubungan tali darah, Grauerholz L Nemnan DM, *Sociology of Families*, (California: Pine Forge Press, 2002), h. 35. Selain itu, bentuk pernikahan ini dapat mempertebal solidaritas kelompok, dapat mencegah bercerai-berainya harta milik dan dapat merupakan pertukaran anak perempuan secara langsung antara kerabat laki-laki yang dekat, Keesing, lihat Roger M, *Cultural Anthropology, A Contemporary Perspective*, terj. *Antropologi Budaya, Suatu Perspektif Kontemporer*, (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 57.

Adat merupakan suatu bentuk tingkah laku dan cara manusia itu berpikir yang telah berwujud dan dilakukan sedemikian rupa dalam waktu lama, sehingga bentuk tingkah laku dan cara berpikir tersebut dianggap sebagai suatu tradisi.¹⁷ Dengan demikian, adat adalah suatu kebiasaan, sedangkan kebiasaan adalah budaya, maka dalam konsep budaya itu akan terdapat etika yang di dalamnya terdapat perilaku yang disebut kebiasaan, moral, adat, aturan dan hukum. Dilihat dari etika, menurut tinjauan alur perkembangan, maka adat itu akan dimulai dengan kebiasaan yang memberi peluang bagi pelakunya untuk melakukan atau tidak melakukan kebiasaan itu, yang tergantung oleh citra dirinya terhadap arena sosial yang dimasukinya. Hukum biasanya dikaitkan dengan kebiasaan, artinya ada sejumlah hal tertentu yang harus dipatuhi seseorang manakala ia masuk dalam lingkaran aturan tertentu; karena itu hukum berkembang dan berawal dari kebiasaan atau adat berikut yang dijelaskan dalam diagram 1:

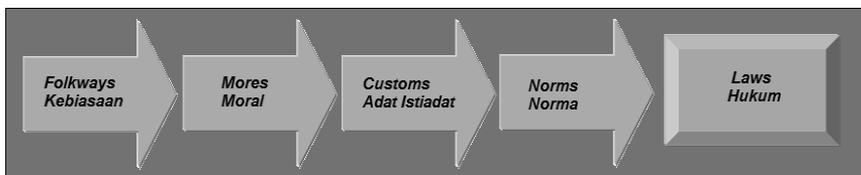


Diagram 1.

**Perkembangan dari Kebiasaan dan Adat Menjadi Hukum.
Sumber: Judistira K Garna, Teori Sosial Pembangunan, h. 84.**

Garna menjelaskan *folkways*, ialah pola kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat; jika kebiasaan itu tidak dilakukan, maka tak ada akibat

¹⁷Menurut Malinowski, adat ialah suatu ragam tingkah laku yang secara tradisi telah disesuaikan bagi anggota suatu komunitas, Bronislaw Malinowski, *Crime and Custom in Savage Society*, (London: Trench & Trubner-Kagan Paul, 1926), h. 90. Sedangkan menurut Sapir, kata adat digunakan bagi seluruh pola tingkah laku yang telah dibentuk oleh tradisi dan tertanam dalam jiwa suatu masyarakat. Sebelum suatu tingkah laku itu menjadi suatu adat istiadat dan tradisi, maka tingkah laku itu haruslah disepakati bersama, dilakukan, dan selanjutnya ditransformasikan kepada generasi-generasi berikutnya, Edward Sapir, *Custom* dalam Seligman, Edwin R.A dan Alvin Johnson (ed.), *Encyclopedia of The Social Sciences*, (New York: Macmillan Company, 1931), h. 75. Seringkali, seseorang dalam melanggar adat masyarakatnya itu harus dilakukan dengan patuh, jika tidak maka akan memperoleh sanksi hukum adat, karena itu anggota komunitas yang melanggar adat dikenakan denda (denda adat berupa benda atau korban) dan pengucilan sosial, Judistira K Garna, *Teori Sosial Pembangunan II*, (Bandung: Primaco Akademika, 2009), h. 83-85.

apapun bagi mereka yang tidak melakukannya. Adapun *mores* dipahami sebagai kebiasaan yang dilakukan seseorang terkait dengan sisi moral tertentu, jika tidak dilakukan misalnya ia akan merasa malu karena dianggap tidak sopan. *Customs*, ialah adat istiadat yang dilakukan seseorang sebagai warga suatu masyarakat (atau komunitas, kerabat, dan etnik) dimana adat ini berada di luar kekuasaan individu. Artinya individu hanya tinggal melaksanakannya saja karena adat merupakan pedoman bagi sikap dan tingkah laku seseorang dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu *norms*, atau norma adalah aturan dalam kehidupan yang mengatur tata cara hubungan satu sama lainnya, ataupun hubungan antara kelompok manusia dengan kelompok lainnya. Lebih jelasnya berikut penulis gambarkan dalam diagram 2 mengenai *reward* dan *punishment* bagi mereka yang mempraktekan adat dari norma yang ada.¹⁸

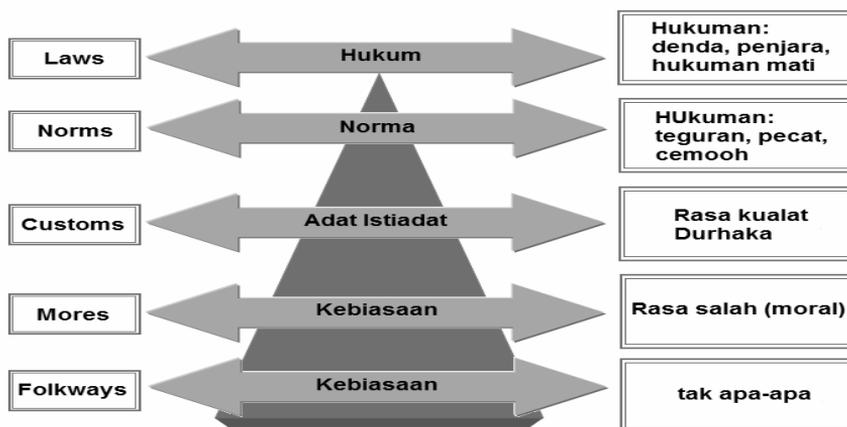


Diagram 2.
Pahala dan Hukuman

Sumber: Judistira K Garna, *Teori Sosial*, h.85.¹⁹

¹⁸Judistira K Garna, *Teori Sosial*, h. 84.

¹⁹Menurut Garna derajat sanksi yang terkena bagi para pelanggar tingkah laku itu akan bergerak dari kebiasaan (*folkways*) menuju kepada hukum (*laws*). Dengan demikian, sanksi itu dapat diartikan sebagai *reward* atau hadiah dan hukuman yang derajat tekanannya akan tergantung pada jenis kepatuhan serta ketidakpatuhan seseorang dalam menjalankan kebiasaan tersebut. Hadiah yang diperoleh karena kepatuhan terhadap kebiasaan, norma ataupun adat akan diterima dengan sepenuh hati sebagai sesuatu yang seharusnya, walaupun hadiah itu hanya berupa pujian saja. Sementara itu, rasa bersalah ataupun rasa kualat individu timbul karena adanya tekanan dari komunitas kepada individu tersebut dalam waktu yang relatif panjang, baik berupa warga komunitas bahkan mungkin

D. Interpretasi Ayat "Hegemoni"²⁰

Menurut penulis, ada tiga penyebab utama mengapa endogami masih dipraktikkan bahkan mengarah pada tahap norma yang mesti dipatuhi, yaitu karena konstruksi agama, sosial dan politik. Ketiga penyebab itu penulis maksudkan sebagai ayat-ayat yang meng"hegemoni". Konstruksi agama dan sosial lahir ketika adanya keyakinan bahwa keturunan syarif memiliki tingkat stratifikasi yang lebih istimewa karena keturunan ini bersambung dengan nabi yang disebut sebagai ahlul bayt nabi dalam surat al-Ahzab [33]: 33.²¹ Ayat dan penegasan dari hadis yang diriwayatkan Ummu Salamah inilah yang penulis maksudkan sebagai ayat ayat hegemoni.²²

Teori hegemoni kurang memusatkan perhatian pada faktor ekonomi dan struktur ideologi yang mengunggulkan kelas tertentu, tetapi lebih menekankan

saja ia akan dikucilkan dari kehidupan sosial komunitasnya. Proses perkembangan kebiasaan atau adat menjadi hukum inilah yang terjadi dikalangan komunitas syarif dalam praktek endogami. Bagi pelaku exogamy akan timbul rasa bersalah, bahkan dicemoohkan dan dikucilkan dari kehidupan sosial masyarakatnya. Judistira K Garna, *Teori Sosial*, h. 85. Oleh karena itu, penulis paparkan lebih lanjut dasar utama penyebab terjadinya pernikahan endogami dikalangan komunitas syarif.

²⁰Teori hegemoni merupakan sebuah teori politik paling penting abad XX. Teori ini dikemukakan oleh Antonio Gramsci (1891-1937) satu dari pemikir politik terpenting setelah Marx. Teori ini merupakan landasan paradigma alternatif terhadap teori Marxis tradisional mengenai paradig *base-superstructure* (basis-suprastruktur) dan sebagai kritik dan alternatif bagi pendekatan dan teori perubahan sosial yang didominasi oleh determinisme kelas dan ekonomi Marxisme tradisional. Teori hegemoni dibangun di atas pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik sehingga orang yang dikuasai mau mematuhi penguasa dengan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa. Bahkan mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka yang boleh jadi mereka sadari ataupun tidak sadari yang Gramsci maksud sebagai "hegemoni" atau menguasai dengan "kepemimpinan moral dan intelektual" secara konsensual, S Hobden & Jones, R.W, "Marxist Theories of International Relations," dalam Smith, S & Baylis, J (pny.), *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, (Oxford: Oxford University Press, 2001), h. 210.

²¹"*Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan kenistaan dari kalian wahai Ahlul Bayt dan menyucikanmu sesuci-sucinya*". Banyak tafsiran menjelaskan siapa ahlul bayt salah satunya adalah penjelasan ahlul bayt adalah Ali, Fathimah, Hasan dan Husen seperti hadis yang diriwayatkan Ummu Salamah: "panggilah suamimu dan kedua putranya, kemudian datanglah Fathimah membawa mereka dan Rasulullah mengerudungkan sehelai kain Fadak di atas mereka. Beliau lalu meletakkan tangannya di atas mereka, seraya bersabda "Ya Allah mereka inilah keluarga Muhammad maka tetapkanlah shalwat dan barakah Mu atas keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah menetapkannya atas keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha Mulia. Ummu Salamah berkata: lalu kuangkat kain itu agar aku bisa masuk bersama mereka tetapi beliau menariknya dari tanganku seraya bersabda sesungguhnya engkau berada diatas kebaikan".

²²Pendekatan yang penulis gunakan bukan menggunakan pendekatan agama seperti penilaian kesahihana matan dan sanad hadis dalam ilmu mustholahul hadis. Namun tulisan ini lebih cenderung melihat aspek sosiopolitik dengan menggunakan teori hegemony sebagai salah satu landasan teori memahami permasalahan identitas etnik syarif Pontianak sebagai salah satu dari keturunan Ahlul Bayt dari cucu Nabi yaitu Husain.

ideologi itu sendiri, bentuk ekspresi, cara penerapan, dan mekanisme yang dijalankan penguasa untuk mempertahankan status quonya melalui kepatuhan para korbannya, sehingga upaya itu berhasil mempengaruhi dan membentuk sikap hidup mereka dalam masyarakat dan alam pikiran mereka. Menurut Gramsci, kekuasaan yang dapat lama bertahan memerlukan suatu sistem kerja baik berupa tindakan kekerasan yang bersifat memaksa maupun bersifat lunak, membujuk. Oleh karena itu, kekuasaan yang terjadi dapat diteruskan dengan diawalinya oleh dominasi dan lama kelamaan digantikan oleh hegemoni.²³

Menurut Gramsci, fungsi hegemoni adalah untuk mengakui dan mengesahkan penguasa dan segala ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh kekuasaan itu. Dengan demikian, bila hegemoni tercapai, penguasa tidak perlu terus-menerus menindas karena yang tertindas kemungkinan tidak menyadari bentuk penindasan tersebut sehingga mereka menerima pada *status quo* yang ada. Ketidaksadaran inilah membuat mereka tidak mampu melihat adanya ketimpangan yang merugikan mereka sendiri bahkan melihatnya sebagai sesuatu yang wajar, alamiah, adil dan sesuai dengan kehendak Ilahi. Banyak cara yang membentuk hegemoni terjadi dalam kehidupan masyarakat bahkan dalam bentuk yang paling persuasive sehingga bentuknya tidak dianggap serius, angker, dan bersifat politis.

Menurut Sugiono, penjelasan Gramsci yang mendudukan hegemoni, sebagai satu bentuk supermasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas yang lainnya, dengan bentuk supermasi lain yang ia namakan "dominasi" yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik.²⁴ Menurut Gramsci, terdapat dua perang kerja agar kekuasaan dapat diteruskan, abadi dan langgeng. *Pertama*, adalah perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang bersifat memaksa atau yang bernuansa *law enforcement* yang biasanya dilakukan oleh pranata negara melalui lembaga-lembaga seperti hukum, militer, polisi dan bahkan penjara.

Kedua, perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat beserta pranata pranata untuk taat pada mereka yang berkuasa melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian dan bahkan juga. Perangkat kerja ini biasanya dilakukan

²³Antonio Gramsci, *Selections Form the Prison Notebook*, (London: Quince Hoore & Goffrey Nowell Smith, 1971), h. 65.

²⁴Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia ketiga*, terj. Cholis, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 31.

oleh pranata masyarakat sipil (*civil society*) seperti LSM, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban-paguyuban dan kelompok-kelompok kepentingan. Dalam konteks endogami, lembaga yang memiliki kekuatan untuk mengatur berlangsungnya pernikahan endogami di kalangan syarif dan syarifah adalah Rabithah Alawiyah sebagai lembaga sosial komunitas syarifah yang berpusat di Jakarta. Namun, lembaga ini tidak memiliki fungsi untuk memaksa atau melakukan tindak kekerasan kepada pelaku exogamy, karena lembaga ini hanya memiliki fungsi sebagai lembaga sosial yang memfokuskan kepada kegiatan sosial dan pendidikan.

Lebih jauh, Gramsci mengatakan bila kekuasaan hanya dicapai dengan mengandalkan kekuasaan memaksa atau “dominasi” maka stabilitas dan keamanan memang tercapai dan gejolak perlawanan tidak terlihat karena rakyat memang tidak berdaya dan tidak mampu berbuat apa-apa. Namun hal ini tidak dapat berlangsung secara terus menerus, sehingga para penguasa yang menyadari keadaan ini secara perlahan-lahan menggantikannya dengan perangkat kerja yang kedua, yaitu “*hegemoni*”. Dengan demikian, terdapat dua cara supermasi kelompok (penguasa) atau kelas sosial yaitu dominasi atau penindasan dan kepemimpinan intelektual dan moral atau hegemoni.²⁵

Beberapa pemaparan di atas, dapat difahami bahwa hegemoni merupakan kekuasaan melalui “persetujuan” (*konsensus*), yang mencakup beberapa jenis penerimaan intelektual atau emosional atas tatanan sosial politik yang ada. Gramsci —dalam hal ini— lebih menekankan pada aspek kultural (ideologis), sehingga menjadi satu-satunya penentu dari sesuatu yang dipandang benar baik secara moral maupun intelektual dalam tradisi atau hukum yang difahami masyarakat.

Ketika ayat ini turun banyak tafsiran difahami oleh para sahabat pada masa itu, namun pada umumnya difahami ayat ini menunjukkan kemuliaan dari ahlu bayt yang memiliki karakter manusia pilihan. Implikasi ayat ini bagi umat Islam pada masa itu menimbulkan rasa cemburu dan prasangka berlebihan yang ditandai dengan peristiwa Karbala ketika Sayyidina Husein dan keluarganya di bunuh oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Oleh karena itu, keturunan Husein yang selamat yaitu Ali Zainal Abidin melakukan dua upaya tindakan prefentif

²⁵Heru Hendarto, “Menenal Konsep Hegemoni Gramsci” dalam *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 74.

dalam menjaga kemaslahatan keturunannya dengan cara pernikahan endogami dan melakukan migrasi. Migrasi dari Irak ke Yaman pada abad ke-4 dilakukan oleh salah satu keturunannya yaitu Ahmad bin Isa atas dasar untuk melindungi keturunannya dari prasangka dan kecemburuan tirani. Bahkan tradisi migrasi dan endogami terus dilakukan hingga keturunan mereka menyebar ke Nusantara salah satunya ke Pontianak Kalimantan Barat.

Dengan demikian, pernikahan endogami dalam komunitas syarif Pontianak dipahami melalui konstruksi agama dan sosial. Kontruksi agama melalui Surat Al-Ahزاب yang dimaksud penulis sebagai ayat hegemoni menjadi dasar keyakinan pernikahan endogami di kalangan komunitas syarif tidak semestinya dilakukan pada bentuk kekerasan, dan paksaan. Endogami ini diraih melalui upaya-upaya politis, kultural dan intelektual guna menciptakan kesadaran individu agar meningkatkan kapasitasnya dalam berbagai aspek sehingga praktik endogami memiliki nilai positif yaitu sebagai potensi social politik.

Pernikahan endogami merupakan media memperkuat jaringan kekerabatan menjadi modal politik dalam upaya meningkatkan dan merubah budaya politik syarif Pontianak. Budaya politik ini dalam suatu tingkat yang sangat tinggi mampu mengembangkan inspirasi, harapan, preferensi dan prioritas tertentu dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan politik. Oleh karena itu, sistem patrilineal menjadi katalisator interaksi sosial internal mereka sehingga hubungan internal mereka menjadi lebih solid, dan menjadi ruang munculnya kekuatan dan budaya politik yang dapat meningkatkan kesadaran, partisipasi dan keterwakilan mereka dalam politik.

E. Transformasi Endogami kepada Exogami

Peralihan seseorang yang meyakini dan mempraktekan pernikahan endogami menunjukkan adanya pilihan dan proses pertimbangan yang dilakukan. Menurut Lamanna dan Riedmann, ada beberapa pertimbangan mengapa seseorang menentukan suatu pilihan, seperti karena adanya *option-option* atau alternatif-alternatif sebagai suatu kemungkinan dan karena adanya tekanan sosial mempengaruhi pilihan personal.²⁶ Tekanan sosial tersebut biasanya

²⁶Ann Mary Lamanna dan Agness Riedmann, *Marriages and Family: Making Choices Throughout the Life of Cycle*, (California: Wadsworth Publishing Company, 1987), h. 47.

berkaitan dengan sejarah seperti: perang, depresi, inflansi, dan perubahan sosial yang mempengaruhi pilihan individu sehari-hari dalam kehidupan berkeluarga. Selain itu, juga karena adanya kelas dan status sosial yang penting dalam mempengaruhi pilihan individu. Ajaran agama juga mampu memberikan pengaruh pilihan seseorang terutama ajaran agama yang cenderung diwarisi melalui keturunannya yang didominasi dalam kehidupan keluarga. Terakhir, dengan adanya pengharapan pada umur tiap individu yang menyadari bahwa kehidupan mereka sendiri mempunyai "*timing*" yang berkaitan dengan pengharapan-pengharapan sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga seperti menentukan bentuk pendidikan yang ditempuh, mendapatkan pekerjaan, menikah dan punya anak.

Lamanna dan Riedmann juga menjelaskan bahwa bagaimana faktor sosial mempengaruhi tindakan seseorang, yakni: pertama, melalui norma-norma sosial yang dapat diterima masyarakat. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan. Norma tidak boleh dilanggar dan siapa pun yang melanggar norma atau tidak bertingkah laku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam norma itu, akan memperoleh hukuman. Kepatuhan terhadap norma-norma kelompok akan memperoleh ganjaran sedang pengingkaran akan memperoleh hukuman.²⁷

Kedua, membatasi pilihan-pilihan individu. Dengan demikian tindakan yang berlangsung dalam kehidupan dapat secara sadar dan tidak sadar. Tindakan secara tidak sadar dilakukan ketika sesuatu itu bagi individu telah menjadi kebiasaan dan mengikuti garis edar yang telah ditentukan, sehingga tidak ada kekuatan untuk menentangnya. Namun, norma sosial yang mengikat syarifah Pontianak untuk melakukan endogami ternyata mengalami pergeseran ketika syarifah memperluas ruang lingkup interaksinya baik dalam proses pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang membentuk kesadaran pilihan rasional sehingga sikap syarifah Pontianak mengenai pernikahan endogami menjadi beraneka ragam. Oleh itu endogami ini direspon secara berbeda oleh para syarifah.

²⁷M. Margaret Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 91.

F. Respon Syarifah terhadap Endogami dan Implikasi Dakwah Islam

Alasan mempertahankan pernikahan endogami dalam pelaksanaan pernikahan itu sendiri adalah bentuk pernikahan yang berlaku di dalam suatu masyarakat seperti bentuk pernikahan eksogami ataupun endogami. Pemilihan bentuk pernikahan tersebut biasanya dipengaruhi oleh aturan yang ada pada keluarga atau masyarakat sekitar lingkungan. Selain itu, orang tua juga mempunyai peranan yang penting untuk menyeleksi atau pengambilan keputusan dalam pemilihan jodoh anaknya. Pernikahan yang saat ini masih terjadi pada kampung Arab Al-Munawar adalah bentuk pernikahan endogami. Pernikahan sesama etnis sampai saat ini tetap terjadi dan bertahan di kampung ini, padahal sulit dibayangkan itu dapat terjadi pada masyarakat perkotaan yang sudah modern dan setiap saat bisa terjadi kontak budaya pada anggota masyarakat lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan yang dilakukan atas dasar pengaruh dari aturan yang ada dari keluarga ataupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Dari data yang diperoleh di lapangan berbagai alasan mempertahankan pernikahan endogami dikemukakan sebagai berikut:

1. Sistem Keekerabatan

Sistem kekerabatan pada masyarakat keturunan Arab menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu prinsip kekerabatan yang melihat hubungan kekerabatan dari pihak ayah atau laki laki. Bentuk sistem kekerabatan tersebut ternyata mempunyai pengaruh terhadap pemilihan pasangan dalam pernikahan. Pengertian keluarga pada masyarakat keturunan Arab disini sebenarnya dapat juga disamakan dengan kelompok kekerabatan yang meliputi orang-orang yang mempunyai kakek bersama (nenek moyang sama) atau yang percaya bahwa mereka adalah keturunan dari seorang kakek yang sama menurut garis perhitungan patrilineal (garis bapak).

Biasanya, nama-nama keluarga atau marga pada keturunan Arab dicantumkan di belakang nama-nama mereka. Aturan yang ditetapkan berdasarkan prinsip patrilineal pada masyarakat kampung ini, bahwa apabila seorang perempuan dari keturunan Arab menikah dengan non Arab maka garis keturunannya akan putus, karena mengikuti garis keturunan ayah, sedangkan bagi laki-laki keturunan Arab, penarikan garis keturunan masih tetap pada keturunan patrilineal mereka walau seandainya mereka menikah dengan keturunan di luar

Arab. Oleh sebab itu, jika perempuan keturunan Arab menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan Arab, maka garis dari Rasulullah tersebut akan terputus hanya pada perempuan tersebut, karena laki-laki yang bukan keturunan Arab tidak memiliki darah keturunan dari Rasulullah.

Dapat disimpulkan, bahwa jelas terlihat ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memilih pasangan di mana hal itu didasari dari penarikan garis keturunan. Perbedaan itu sangat menonjol dimana terlihat bahwa laki-laki lebih mendapatkan toleransi dalam menentukan pasangannya ketimbang perempuan. Semua itu tidak terlepas dari adanya aturan yang telah ada terlebih lagi berlandaskan pada ajaran agama yang mau tidak mau harus diikuti oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu, faktor kemurnian keturunan darah yang lebih diutamakan pada masyarakat keturunan Arab ini, sehingga mereka menolak sistem pernikahan eksogami yang jelas akan selalu menimbulkan adanya percampuran darah dan lebih memilih sistem pernikahan endogami yang jelas bersifat membendung terjadinya percampuran darah, mengingat orang-orang yang melangsungkan pernikahan itu semuanya masih satu keturunan yang sama.

2. Sistem Pernikahan

Sistem pernikahan yang berlaku pada masyarakat keturunan Arab merupakan sistem pernikahan endogami, yang biasa pada masyarakat kampung ini mengenal dengan istilah pernikahan dengan sesama kami atau sesama keturunan Arab. Di mana dengan bentuk sistem pernikahan tersebut memiliki aturan khusus yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya karena sudah menjadi suatu kebiasaan yang telah dijalankan dari dahulu sampai sekarang. Jika ada yang melanggar sistem pernikahan endogami tersebut khususnya berlaku untuk perempuan maka akan adanya sanksi dari masyarakat jika tidak menjalankan tradisi yang telah dipertahankan sejak lama.

Mengamati masalah endogami merupakan hal yang menarik jika mendapatkan respon dari pelaku endogami itu sendiri yaitu para syarifahnya atau yang dikenal dengan pendekatan *emik*. Berdasarkan pendekatan *emik*, terdapat tiga pandangan utama mengenai endogami. *Pertama*, mereka yang memberikan respon positif atau yang menerima endogami dan mempraktikkannya. Kelompok yang menerima ini memiliki keyakinan yang tinggi tentang endogami, hingga ke tahap meninggalkan endogami suatu hal yang tabu dan tidak dibenar-

kan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara ada beberapa alasan mengapa para syarifah ini menerima endogami. *Pertama*, karena sebagian besar syarifah ini menetap atau berada dalam komunitas lingkungan kelompok keluarga syarif, sehingga secara tidak langsung mereka dapat memahami dan menerima endogami.

Kedua, pola pendidikan agama terutama pesantren yang membatasi pergaulan hanya di ruang lingkup pesantren yang banyak dipengaruhi kurikulum dari Hadramaut Yaman. *Ketiga*, pengaruh dari internal keluarga terutama sekali orang tua yang mengajarkan meyakinkan endogami merupakan suatu tradisi yang tidak boleh atau *tabu* untuk dilanggar. *Keempat*, pengaruh dari external seperti kerabat, sahabat dan juga media informasi yang diterima dari keluarga seperti buletin muhajir ataupun acara pengajian keluarga seperti *Haul*, bacaan *Manāqib* dan *Ratib*.

Adapun mereka yang menolak pernikahan endogami memiliki beberapa penyebab seperti *pertama* pola menetap atau tempat tinggal yang segregatif atau tersebar dan tidak menetap dalam komunitas syarif. *Kedua*, pola pendidikan yang modern sehingga lebih membaur dengan masyarakat umum. *Ketiga*, kurang mendapat pengaruh internal terutama sekali keluarga atau orang tua. Keempat, kurang mendapat pengaruh external terutama sekali dari lembaga sosial. Selanjutnya ketiga ialah yang berpikir moderat artinya tidak anti dengan endogami namun tidak mewajibkan endogami karena menyakini endogami sebagai tradisi. Kebanyakan mereka yang berpikiran moderat cenderung memiliki pola pemukiman dan interaksi yang lebih membaur.

Selain itu, latar belakang pendidikan mereka juga terdiri dari pesantren atau pendidikan agama, tapi dengan pola modern bahkan cenderung mengecap pendidikan umum dan perguruan tinggi. Pola pendidikan internal yang diterima juga karena bersifat moderat bisa jadi karena latar belakang pendidikan orang tua, serta orang tua mereka melakukan pernikahan campuran (ayah Syarif ibu bukan syarifah). Artinya, pengaruh internal ini juga dipengaruhi oleh faktor external baik yang datang dari keluarga ibu maupun lingkungan besar lainnya.

Tiga respon yang berbeda ini terjadi karena adanya perbedaan memahami dan menjalankan identitas kultural yang ada, disatu sisi masih melekat pengaruh Arab namun di satu sisi karena asimilasi dan pembauran yang menyatu dengan budaya lokal. Menurut Tomey, identitas kultural merupakan perasaan (*emotional significance*) dari seseorang untuk ikut memiliki (*sense of belonging*) atau

berafiliasi dengan kultur tertentu. Dalam hal ini, komunitas syarif yang terbagi kedalam kelompok-kelompok kemudian melakukan identifikasi kultural (*cultural identification*) dimana masing-masing orang mempertimbangkan diri mereka sebagai representasi dari sebuah budaya particular dalam hal ini di Pontianak adalah budaya Melayu.²⁸

Identifikasi kultural ini, menurut Rogers dan Steinfatt akan menentukan individu-individu yang termasuk dalam *in-group* dan *out-group*. Bagaimana mereka berperilaku sebagian ditentukan oleh apakah mereka termasuk kedalam budaya tertentu atau tidak.²⁹ Dalam hal ini, syarif Pontianak dalam konteks keluarga besarnya termasuk dalam group etnik Melayu dan masih mempertahankan subkultur Arab salah satunya pernikahan endogami. Sebab itu, identifikasi kultural syarif Pontianak memiliki metode dan keunikan tertentu dalam memahaminya karena identifikasi ini bermula dari migrasi leluhur mereka dari hadramaut Yaman ke Pontianak.

Dalam konteks identifikasi kultural ini, Suparlan menilai isu tentang etnis dan etnisitas dalam masyarakat Indonesia yang majemuk merupakan realitas yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Para anggota kelompok etnis dilahirkan, dididik dan dibesarkan dalam suasana askriptif primordial etnisitas mereka. Akibatnya, perbedaan antara “*siapa saya*” dengan “*siapa Anda*” atau “*siapa kami*” dengan “*siapa mereka*” terlihat dengan jelas batas-batasnya.³⁰ Dalam situasi seperti itu, stereotip dan prasangka tumbuh dan berkembang subur. Inilah yang mendasar mengapa *feeling out group* syarif Pontianak dalam kasus endogami menjadi kuat.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas tentang identitas kultural, nampak bahwa masalah etnisitas dalam masyarakat syarif Pontianak merupakan suatu wacana yang menarik untuk dipahami dan diusahakan pemecahannya, terlebih isu etnisitas yang terlampaui agresif dipahami dan dipraktekkan, yang mungkin menimbulkan masalah sosial seperti prasangka, etnosentris, dan diskriminasi. Searah dengan hal itu, Rahardjo menegaskan bahwa dalam

²⁸Ting Stella Toomey, *Communicating Across Cultures*, (New York: The Guilford Publications Inc, 1999), h. 30.

²⁹ Everett M. Rogers, Thomas & M. Steinfatt, *Intecultural Communication*, (Illinois: Waveland Press Inc, 1999), h. 97.

³⁰Parsudi Suparlan, “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural”, *makalah* disampaikan dalam Simposium Internasional III Jurnal Antropologi Indonesia, Universitas Udayana, Bali, 2002, h. 7.

masyarakat yang terbagi kedalam kelompok-kelompok berdasarkan identitas kultural akan sulit mencapai keterpaduan sosial (*social cohesion*).³¹ Sebab, masing-masing kelompok berada dalam lingkup pergaulan yang eksklusif sehingga relatif tidak intensif dalam melakukan interaksi dan komunikasi antarbudaya, yaitu interaksi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk mengurangi kesalahpahaman budaya tetapi justru cenderung melakukan penghindaran interaksi dan kontak sosial. Keterpaduan sosial yang dimaksud adalah suatu kondisi yang memungkinkan masing-masing kelompok dapat menjalin interaksi dan kontak sosial tanpa harus kehilangan identitas kultural mereka. Akibat dari tidak adanya keterpaduan sosial ini, maka usaha untuk membentuk kehendak bersama sebagai suatu bangsa menjadi persoalan yang rumit dan membutuhkan waktu yang relatif panjang.

Menurut penulis, keterpaduan sosial yang berupa interaksi dan kontak sosial dengan tidak menghilangkan identitas kultural suatu etnik atau kelompok masyarakat merupakan suatu alternatif pendekatan menuju masyarakat multikulturalisme, yaitu masyarakat yang tidak saja mengenal, memahami bahkan menghormati perbedaan yang ada sehingga dapat hidup berdampingan dengan aman dan damai. Penyebaran nilai-nilai agama (*dakwah*) yang menyampaikan kesamaan kedudukan manusia di hadapan Tuhan merupakan hal yang penting dalam konteks ini. Di dalam surat al-Hujurat ayat 13 dinyatakan: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."*³²

Ayat di atas sangat kontekstual untuk diterapkan di kalangan komunitas Ba 'Alawi karena pandangan endosentrik serta stereotypic yang berkembang di kalangan komunitas itu adalah bahwa komunitas Ba 'Alawi memandang dirinya sangat *superior* dibanding kelompok suku lain. Jika komunitas Ba 'Alawi mendasarkan sikap stereotypic itu dengan landasan teks agama, namun ternyata ada teks agama lain yang menyatakan kesamaan derajat semua manusia. Upaya

³¹Rahardjo, Tumomo, *Menghargai Perbedaan Kultural Mindfulness dalam Komunikasi antar Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 49.

³²QS. al-Hujurat [49]: 13.

diseminasi nilai-nilai ini penting dilakukan agar terjadi internalisasi nilai bahwa kelompok kesukuan tidak menentukan kebaikan karena sebenarnya kebaikan kemanusiaan ditentukan oleh aktifitas dan perbuatan individual, dan bukan kelompok.³³

Dengan upaya penyebaran nilai-nilai agama tersebut, meskipun endogami tetap berlangsung di kalangan syarif di Pontianak ini karena sifatnya ideologis dan sosio-kultural namun transformasi budaya akan berjalan dan pada akhirnya akan membentuk komunitas yang lebih egaliter, tanpa memandang komunitas lain lebih rendah dibandingkan dengan komunitas syarif tersebut. Dinyatakan memiliki sifat ideologis karena keluarga kecil dianggap sebagai agen pendidikan pertama dalam mengenalkan "kealawiyinan" serta kontrak sosial dari komunitas tersebut. Kontrak sosial tersebut meliputi pernikahan endogami, pengiriman ke pendidikan pesantren tradisional atau ke Yaman, serta upacara tradisi berupa pembacaan *ratib*, *manaqib* dan *haul* para pendahulu atau nenek moyang.

Sementara apabila upaya penyebaran nilai-nilai agama yang menanamkan nilai kesamaan dan *silaturrahim* dapat berlangsung dengan baik maka faktor sosial budaya yang menghambat hubungan antar komunitas akan dapat semakin berkurang. Faktor sosial budaya yang dimaksud di sini adalah faktor yang menyebabkan mereka hidup secara berkelompok, serta sangat berpegang teguh pada sistem kekerabatan yang ada. Keengganan untuk hidup berkelompok dan menyatu dengan komunitas lain karena pandangan bahwa komunitas lain merupakan kelompok yang berbeda dengan kelompoknya sendiri.

Potensi media afiliasi kelompok yang ada di kalangan Ba 'Alawi seperti pembacaan *ratib*, *manaqib* dan *haul* sebagai media diseminasi nilai-nilai tersebut. Jika merujuk unsur-unsur dakwah, metode penyebaran nilai-nilai tersebut yang penting untuk dipertimbangkan. Dengan mempertimbangkan "*self-image*" anggota komunitas Ba 'Alawi yang tinggi maka penyampaian nilai-nilai kesetaraan antar manusia harus dilakukan secara tepat agar tidak mengakibatkan efek yang sebaliknya (*contra-productive*).

Dengan demikian, jika informasi tekstual keagamaan tersampaikan dengan baik maka pertimbangan endogami akan dilakukan dengan lebih baik dan

³³QS. al-Mukmin [40: 40: "Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab." (Lihat juga QS. al-Taubah [9]: 72 dan QS. al-Nahl [16]: 97).

rasional. Namun demikian, berbicara tentang endogami dalam konteks seperti ini memang ibarat dua sisi dari mata uang. Di salah satu sisi endogami dapat memperkuat potensi politik komunitas syarif. Penjelasaannya adalah bahwa dengan mengakarnya ikatan etnisitas akan menjadi katalisator peran syarif dalam politik dan kehidupan sosial masyarakat. Di sisi lain, jika endogami ini diyakini sebagai norma yang absolute dan pantang untuk dilanggar maka akan memungkinkan timbulnya ancaman sosial karena akan membatasi kebebasan orang dalam bertindak terutama, bagi para perempuannya.³⁴ Inilah yang harus menjadi perhatian.

G. Kesimpulan

Terdapat perubahan pola pernikahan pada pernikahan endogami yang semula memilih pernikahan antar keluarga, antar marga atau wobilah, kelompok sosial, status ekonomi, kemudian telah beralih ke pernikahan eksogami sebagai akibat adanya modernisasi, kontak dengan budaya luar, pengaruh pendidikan, sosial ekonomi, dan pola interaksi dan tempat tinggal. Endogami sebagai implikasi dari ayat-ayat hegemoni ini tidak hanya memberikan pengaruh terhadap kondisi politik, namun membentuk subkultur pernikahan endogami yang dipraktekkan oleh keturunan Ahmad bin Isa al-Muhajir yang salah satunya adalah syarif Pontianak.

Implikasi positif endogami adalah menjaga nilai-nilai kearifan lokal komunitas syarif, seperti nilai-nilai kekerabatan yang secara politik berpotensi sebagai modal sosial untuk meningkatkan kesadaran dan budaya politik dalam konteks partisipasi dan keterwakilan komunitas syarif dalam politik lokal dan nasional. Adapun implikasi negatif secara sosio-budaya jika difahami sebagai sistem absolute yang mesti dijalankan dapat membuka ruang terjadinya stratifikasi sosial yang mengancam kebebasan perempuannya dan membuka ruang subordinasi. Oleh karena itu dibutuhkan upaya penyebaran nilai-nilai agama yang multikulturalis agar tertanam nilai saling menghargai dalam keragaman komunitas dan budaya yang ada di Indonesia.[w]

³⁴Robert Ullman, *Redefining Security*, (United States: International Security, 1983), h. 75.

BIBLIOGRAFI

- Amal, Siti Hidayati, "Menelusuri Jejak Kehidupan Keturunan Arab Jawa di Luar Tembok Keraton Yogyakarta" *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 29 No. 2, 2005.
- Berg, Van den, L.W.C, *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara*, Jakarta: INIS, 1989.
- Garna, Judistira K, *Teori Sosial Pembangunan II*, Bandung: Primaco Akademika, 2009.
- Gramsci, Antonio, *Selections form the Prison Notebook*, London: Edited and translated by Quince Hoore & Goffrey Nowell Smith, 1971.
- Halim, Ridwan, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghali Indonesia, 1987.
- Hendarto, Heru, "Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci" dalam *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, Jakarta: Kompas Gramedia, 1993.
- Hobden, S & Jones, R.W, "Marxist Theories of International Relations," dalam Smith, S & Baylis, J. (eds.), *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Keesing, Roger M, *Cultural Anthropology, A Contemporary Perspective*, terj. *Antropologi Budaya, Suatu Perspektif Kontemporer*, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta 2002.
- Lamanna, Ann Mary & Agness Riedmann, *Marriages and Family: Making Choices Throughtout the Life of Cycle*, California: Wadsworth Publishing Company, 1987.
- Malinowski, Bronislaw, *Crime and Custom in Savage Society*, London: Trench & Trubner-Kagan Paul, 1926.
- Nemnan DM, Grauerholz L, *Sociology of Families*, California: Pine Forge Press, 2002.
- Parwesi, Ni Kadek Yunita, "Perkawinan Endogami di Kalangan Masyarakat Tenganan Pegringsingan di Kabupaten Karangasem Bali," *Tesis*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Gajahmada, 2012.

- Patria, Nezar dan Andi Arief, *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Poloma, M Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- al-Qadri, H, *Dutch Policy Against Islam and Indonesians of Arab Descent in Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Rahardjo, Turnomo, *Menghargai Perbedaan Kultural Mindfulness dalam Komunikasi antar Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rizkiati, Kurnia, "Perkawinan Endogami pada Masyarakat Keturunan Arab (Studi di Kampung Arab Al-Munawar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang), *Skripsi* tidak diterbitkan, Palembang: Universitas Sriwijaya Palembang, 2012.
- Rogers, Everett M., Thomas & M. Steinfactt, *Intecultural Communication*, Illinois: Waveland Press Inc, 1999.
- Sapir, Edward, "Custom" dalam Selingman, Edwin RA & Alvin Johnson (ed.), *Encyclopedia of The Social Sciences*, New York: Macmillan Company, 1931.
- Shahab, Yasmine Zaky, "Sistem Kekebabatan Sebagai katalisator Peran Ulama Keturunan Arab di Jakarta," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 29 No. 2, 2005,
- Shahab, Yasmine Zaky, *Endogami and Multiculturalism: The Case of Hadrami in Indonesia*.
- Simon, Roger, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar, 1999.
- Siregar, Hamka, "Pernikahan Endogami pada Komunitas Arab Alawiyyun kota Pontianak," Disertasi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Sugiono, Muhadi, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, terj. Cholis. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999
- Suparlan, Parsudi, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural", makalah disampaikan dalam Simposium Internasional III *Jurnal Antropologi Indonesia*, Universitas Udayana, Bali tahun 2002.
- Toomey, Ting Stella, *Communicating Across Cultures*, New York: The Guilford Publications Inc., 1999.
- Ullman, Robert, *Redefining Security*, United States: International Security, 1983

Upe, Ambo, *Tradisi Aliran dalam Sosiologi: dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

William, Goode, J, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.